

MENINGKATKAN PERAN STRATEGIS LAN RI MELALUI PELATIHAN PASCA RETRET SEKDA 2025

Ditujukan Kepada : LAN RI

EXECUTIVE SUMMARY

Tahun 2024, pemerintah pusat menggagas retreat nasional bagi kepala daerah sebagai upaya memperkuat keselarasan antara visi pembangunan nasional dengan arah kebijakan daerah. Langkah ini kemudian diperluas dengan rencana retreat serupa bagi Sekretaris Daerah (Sekda), mengingat posisi Sekda sangat strategis dalam menjembatani kebijakan politik kepala daerah dengan proses teknokratis perencanaan dan penganggaran daerah. Retreat ini dimaksudkan sebagai media komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan agenda prioritas nasional tercermin dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Namun, efektivitas retreat sebagai intervensi kebijakan sangat bergantung pada kesinambungan pasca-kegiatan berupa pelatihan lanjutan, pendampingan teknis, dan sistem pembelajaran yang terstruktur.

Meski gagasan retreat memiliki niat baik, sejumlah permasalahan mengemuka dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Retreat cenderung bersifat simbolik karena tidak dilengkapi dengan mekanisme coaching, pelatihan teknis, atau monitoring yang berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan serius antara indikator makro pembangunan nasional dengan pemahaman serta kapasitas teknis para perencana daerah, termasuk Sekda. Forum Sekda seperti Forsesdasi pun belum dioptimalkan sebagai simpul pembelajaran nasional karena minim partisipasi aktif, belum terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah pusat, dan tidak memiliki daya dorong terhadap pengambilan keputusan kebijakan nasional. Tanpa intervensi struktural yang terencana, peluang retreat untuk menciptakan dampak sistemik akan sulit tercapai.

Merespons situasi tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI perlu mengambil peran sentral dalam mendesain dan menyelenggarakan pelatihan lanjutan pasca-retret bagi Sekda. Pelatihan ini harus bersifat tematik, kontekstual, dan berbasis proyek nyata yang terhubung langsung dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD. LAN juga perlu mendorong transformasi Forsesdasi menjadi bagian dari ekosistem ASN Corporate University (ASN Corpu) yang lebih kolaboratif dan adaptif, menjadikannya ruang pembelajaran lintas daerah yang inklusif dan terdokumentasi. Pelatihan pasca-retret perlu dirancang dengan melibatkan Bappenas dan Kemendagri dalam model kerja kolaboratif untuk memastikan substansi kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara teknis di tingkat daerah, serta dilengkapi dengan sistem evaluasi dampak berbasis hasil.

Dengan mandat sebagai pembina kompetensi ASN, LAN RI berada pada posisi strategis untuk mentransformasikan momentum retreat Sekda menjadi lompatan dalam reformasi kapasitas kepemimpinan daerah. Tidak sekadar menjalankan pelatihan administratif, LAN perlu tampil sebagai penggerak utama ekosistem pembelajaran strategis berbasis data dan hasil. Momen ini menjadi peluang emas bagi LAN untuk memperkuat peran kelembagaannya sebagai arsitek pengembangan SDM aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

PENDAHULUAN

Tahun 2024, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara secara intensif mendorong format retreat nasional bagi kepala daerah hasil pemilihan umum serentak tahun 2024. Sebanyak 505 Kepala daerah telah mengikuti retreat gelombang pertama yang dilaksanakan pada 21 – 28 Februari 2025 di Akmil Magelang Jawa Tengah, gelombang kedua diselenggarakan 22 – 26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor dengan diikuti oleh 87 Kepala daerah, dan pada tahun 2025 ini pula Kemendagri menginisiasi untuk merencanakan retreat nasional bagi Sekretaris Daerah (Sekda). Wacana retreat untuk sekda ini dilaterebelakangi oleh semakin tampaknya kesenjangan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Dalam forum Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah pada 14 Juni 2023, Kepala Bappenas periode saat itu, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa “banyak terjadi deviasi antara RPJMD kabupaten/kota yang dengan RPJMN.”



Hal tersebut kembali diperkuat oleh Kepala Bappenas saat ini, Rachmat Pambudy, yang dalam pernyataannya di DDTCTNews tanggal 25 Juni 2025 menekankan “pentingnya keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.”

Beberapa faktor utama yang menyebabkan RPJMD kabupaten/kota belum selaras dengan RPJMN antara lain:

- Ruang Kreativitas Daerah yang Terlalu Luas: Kepala daerah memiliki keleluasaan dalam merumuskan visi, misi, dan program prioritas, yang kadang tidak mengacu pada sasaran nasional. Akibatnya, prioritas daerah bisa berbeda dengan prioritas nasional.
- Kurangnya Koordinasi dan Konsultasi: Proses konsultasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dan pusat belum optimal, sehingga sinkronisasi kebijakan dan program sering terlewat.
- Perbedaan Isu dan Kebutuhan Lokal: Daerah menghadapi masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga solusi yang diambil kadang tidak sejalan dengan kebijakan nasional.
- Keterlambatan Penyusunan Dokumen: Proses penyusunan RPJMD yang terlambat, misalnya akibat sengketa hasil pilkada, membuat program strategis nasional di daerah tidak mendapat dukungan optimal. Di sisi lain, evaluasi Bappenas dalam Rakortekbang 2024 (antaranews.com, Juni 2024) menyimpulkan bahwa banyak pejabat perencana daerah—termasuk Sekda dan OPD—belum sepenuhnya memahami indikator utama pembangunan nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan pemahaman indikator utama pembangunan nasional di kalangan perencana daerah masih rendah antara lain:
 - Kompleksitas dan Banyaknya Indikator: Metadata indikator pembangunan nasional sangat luas dan teknis, mencakup ratusan indikator lintas sektor.
 - Kurangnya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis: Tidak semua daerah mendapatkan pendampingan intensif terkait pemaknaan dan penggunaan indikator dalam perencanaan dan pelaporan.



PENDAHULUAN

- Keterbatasan Kapasitas SDM: Banyak perencana daerah belum memiliki latar belakang teknis yang memadai untuk memahami detail indikator dan cara pengukurannya.
- Keterbatasan Data dan Sistem Informasi: Tidak semua indikator dapat diukur dengan data yang tersedia di daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya menjadi terbatas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, posisi Sekda sangat strategis. Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi berbasis merit system, Sekda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran sentral dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan pembangunan daerah. Dengan latar belakang pelatihan manajerial seperti Diklatpim atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II maupun I, Sekda memiliki bekal yang cukup untuk mengorkestrasi kebijakan daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional. Wacana retreat dinilai efektif untuk menyampaikan visi misi pembangunan pemerintah kedepan untuk diselaraskan dengan visi misi dan pembangunan daerah terlebih lagi sekda adalah tim “tandem” strategis kepala daerah yang memegang kendala teknis dalam pengelolaan APBD, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN di tingkat daerah. Retreat dinilai efektif menyampaikan visi politik pusat secara langsung, namun tanpa kelanjutan melalui pelatihan aplikatif dan konsisten, retreat berisiko hanya menjadi forum simbolik tanpa mendorong transformasi sistemik di tingkat daerah.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan terhadap program rencana retreat di maksud

1. Retreat Belum Dirancang untuk Reformasi Kapasitas Jangka Panjang

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan mendasar terhadap rencana program retreat yang ditujukan bagi Sekretaris Daerah. Salah satu isu utama adalah bahwa retreat belum dirancang sebagai instrumen untuk mereformasi kapasitas birokrasi daerah secara jangka panjang. Pengalaman dari retreat Kepala Daerah sebelumnya menunjukkan absennya kurikulum lanjutan, kegiatan coaching, maupun pendampingan teknis yang terstruktur pasca-kegiatan. Kemungkinan besar, retreat Sekda juga akan menghadapi pola serupa. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan Kompas pada 26 Februari 2025 "<https://www.kompas.id/artikel/usai-retret-diharapkan-ada-dokumen-kesepakatan-bersama-pemerintah-pusat-dan-daerah>". yang menggarisbawahi bahwa hingga kini belum ada jaminan formal bahwa hasil diskusi dan kesepakatan dalam retreat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawalan yang sistematis. Padahal, Sekda memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelaraskan dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD dengan arah kebijakan nasional. Tanpa dukungan pendampingan yang berkelanjutan dari pusat, beban orkestrasi ini menjadi terlalu besar untuk ditanggung secara mandiri oleh Sekda. Lebih lanjut, Sekda sering kali mengalami kesulitan dalam menerjemahkan visi nasional ke dalam aksi kebijakan konkret di daerah. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknokratik, tetapi juga akibat absennya forum pembelajaran yang adaptif serta minimnya integrasi lintas kelembagaan antara daerah dengan kementerian sektoral. Jika pola pelaksanaan retreat tetap mengabaikan kebutuhan penguatan pasca-kegiatan, maka retreat berpotensi hanya menjadi seremoni komunikasi politik jangka pendek, tanpa kontribusi maksimal terhadap transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih strategis, sinkron, dan berorientasi hasil.

DESKRIPSI MASALAH

2. Ketidakharmonisan Indikator Pembangunan Antara Tingkat Nasional dan Daerah

Dari Press Release Komisi XI DPR Periode Minggu 2 November 2024 yang berjudul "Isu Sepekan Bidang Ekuinbang Komisi XI, DPR 2024, disebutkan bahwa dari 19 indikator pembangunan, diproyeksikan hanya lima indikator atau 26,31% yang tercapai. Ketidaktercapaiannya terikat indikator pembangunan pada periode RPJMN 2020 - 2024 perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam siklus perencanaan. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan selanjutnya dapat menghasilkan program yang berkualitas. Banyak daerah belum mampu menerjemahkan indikator makro nasional, misalnya target penurunan kemiskinan atau digitalisasi layanan ke dalam indikator teknis dan terukur di level lokal. Hal ini menghambat pencapaian target pembangunan nasional secara agregat.

3. Keberlanjutan Forum Pembelajaran Terfokus untuk Sekda

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) saat ini menjadi salah satu wadah diskusi dan pembelajaran antarsekda. Namun efektivitasnya masih terbatas karena berbagai hambatan. Pertama, Forsesdasi tidak memiliki legal standing yang kuat sebagai entitas kelembagaan resmi. Keputusan-keputusannya bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendorong implementasi kebijakan daerah maupun nasional (Maluku Post, 2023). Kedua, partisipasi Sekda antarwilayah dalam forum ini tidak merata. Misalnya, dalam Rakorwil Forsesdasi Jawa Tengah tahun 2023, hanya 27 Sekda yang hadir dari puluhan kabupaten/kota yang ada (Suaramerdeka.com, 2023), dan di beberapa wilayah tidak tercatat kepengurusan aktif.

Ketiga, Forsesdasi belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi nasional seperti SIPD, e-SAKIP, atau Sistem Evaluasi KemenPAN-RB. Tidak ada mekanisme formal yang menghubungkan hasil diskusi Forsesdasi ke dalam pipeline kebijakan yang sedang dikembangkan pemerintah pusat, padahal SIPD saat ini telah mencakup lebih dari 50% pemerintah daerah dan terus diperluas cakupannya hingga 100%. Keempat, rekomendasi Forsesdasi jarang menjadi bahan resmi dalam perumusan kebijakan nasional. Misalnya, hasil Rakorwil Forsesdasi Kalsel tahun 2024 yang membahas tata kelola hibah vertikal dan manajemen SDM non-ASN tidak tercatat dalam agenda kebijakan nasional Kemendagri atau Bappenas (Kalimantanlive.com, 2024). Hal ini menunjukkan adanya jarak struktural antara hasil forum dan proses pengambilan kebijakan yang berdampak.

Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi XI

Minggu ke-2 November
(11 s.d. 17 November 2024)

2024

INDIKATOR PEMBANGUNAN TIDAK TERCAPAI,
PERLU NYA PERBAIKAN PERENCANAAN
RPJMN SELANJUTNYA

Pusat Analisis Keparlemen
Badan Keahlian Sejen DPR RI

Edmira Rivani
Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. RPJMN 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020. Pada RPJMN disebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan, terdapat 505 indikator yang terbagi ke dalam tujuh agenda pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Perpres No. 18 Tahun 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) wajib melakukan evaluasi terhadap RPJMN yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN untuk nantinya dilaporkan kepada Presiden.

Di akhir tahun pelaksanaannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa dari 19 indikator pembangunan, diproyeksikan hanya lima indikator atau 26,31% yang tercapai. Ke lima indikator yang diproyeksikan tercapai adalah (i) nilai tukar petani; (ii) skor pola pangan harapan; (iii) penurunan emisi gas rumah kaca; (iv) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (v) angka kemiskinan ibu. Data yang disampaikan hanya sebagian kecil dari indikator yang ada. Salah satu indikator yang tidak tercapai adalah pada sektor perekonomian. Padahal, sektor perekonomian adalah hal terpenting dalam mewujudkan Indonesia keluar dari middle income trap sesuai dengan target yang dibuat oleh Bappenas.

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan bernegara. Ketidaktercapaian indikator pembangunan mengindikasikan adanya permasalahan dalam siklus perencanaan pembangunan itu sendiri. Pertama, pada tahapan perencanaan, pada tahapan ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul, antara lain (i) basis data yang digunakan dalam menentukan target indikator pembangunan, sejak ditetapkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ketidaksinkronan data selalu menjadi permasalahan, dengan data yang salah di khawatirkan ketepatan yang diambil tidak akurat; (ii) sejak tahun 2020 - 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mencatatkan defisit, jika dilihat dari posturnya, penerimaan negara bertumpu pada sektor perpajakan, maka dari itu perlu adanya perluasan sumber pendanaan inovatif lainnya; (iii) perencanaan pembangunan yang ada saat ini terlalu bersifat sektoral. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan program guna mencapai tujuan pembangunan bersama.

Kedua, pada tahapan pengendalian masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator, serta Kantor Staf Presiden dalam melakukan pengendalian program pembangunan. Maka dari itu,

PRAKTIK BAIK

Singapura – Senior Management Programme (Civil Service College)

Program ini ditujukan bagi para pimpinan senior sektor publik, khususnya mereka yang berada di posisi Director hingga Permanent Secretary. Program dirancang agar peserta tidak hanya memahami strategi nasional, tetapi juga mampu menggerakkan transformasi organisasi masing-masing. Proyek akhir (capstone project) peserta harus dikaitkan langsung dengan isu kebijakan nasional seperti Smart Nation, Whole-of-Government Collaboration, atau Green Plan. Peserta didorong untuk menggerakkan transformasi organisasi dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Sumber: Civil Service College Singapore, www.cscollege.gov.sg.

Korea Selatan – KDI School Leadership Programs

Diselenggarakan oleh Korea Development Institute School of Public Policy and Management, pelatihan ini menasar pejabat daerah dan nasional untuk membangun kemampuan dalam strategi pembangunan regional, manajemen berbasis indikator makro, dan evaluasi kebijakan. Programnya berbasis data dan mendorong peserta menyusun rencana pembangunan daerah berbasis bukti (evidence-based planning). Peserta juga didampingi dalam membuat policy proposal yang berbasis bukti selama pelatihan. Sumber: www.kdischool.ac.kr.

Kanada – Federal-Provincial Public Servants Exchange Program

Program ini memungkinkan pertukaran jabatan antara pejabat pemerintah pusat dan provinsi untuk memperkuat pemahaman lintas yurisdiksi, khususnya dalam isu-isu fiskal, layanan sosial, dan regulasi lingkungan. Selain pelatihan teknis, program ini menekankan pentingnya kolaborasi sektoral dan simulasi negosiasi kebijakan antarwilayah. Sumber: Government of Canada, Canada School of Public Service, www.csps-efpc.gc.ca.

LESSON LEARN UNTUK LAN RI

Pelatihan pasca-retret perlu mencontoh praktik-praktik ini dengan menyusun format tematik, berbasis proyek nyata, terhubung ke dokumen kebijakan dan dokumen perencanaan, dan dibingkai dalam kerangka kolaboratif antardaerah.



REKOMENDASI

1. Rancang Program Pelatihan Lanjutan Pasca-Retret Sekda

LAN RI perlu merancang program pelatihan lanjutan yang bersifat tematik dan kontekstual, bukan sekedar pengulangan Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Fokus pelatihan diarahkan pada penguatan kapasitas teknokratik Sekda dalam mengintegrasikan RPJMD dengan RPJMN, kepemimpinan kolaboratif lintas-OPD, penguatan indikator kinerja daerah, serta transformasi layanan publik digital. Pelatihan harus berbasis proyek nyata, studi kasus aktual, dan dilengkapi dengan coaching tematik serta pendampingan teknis

2. Jadikan Forsesdasi Ekosistem Corpu Nasional

Saat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) di seluruh Indonesia memiliki wadah komunikasi dan koordinasi melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi). Forum ini berperan dalam mempertemukan para Sekda untuk mendiskusikan isu-isu strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan pada skala nasional. Namun demikian, fungsi Forsesdasi saat ini masih terbatas pada peran sebagai forum informal dan ad-hoc, dengan keterlibatan yang belum merata antar daerah.



Di sisi lain, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tengah **mengembangkan ASN Corporate University (ASN Corpu) sebagai ekosistem pembelajaran nasional yang terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan**. Dalam konteks ini, Forsesdasi memiliki potensi besar untuk diintegrasikan sebagai **bagian dari ekosistem ASN Corpu**, tidak hanya sebagai komunitas diskusi, tetapi juga sebagai simpul pembelajaran lintas daerah yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas ASN.

LAN RI dapat mengembangkan Forsesdasi menjadi *hub* pembelajaran kolaboratif yang menyasar tidak hanya Sekda, tetapi juga perangkat daerah (OPD) lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam forum. Dengan perluasan fungsi ini, Forsesdasi dapat menjadi wahana berbagi pengetahuan dan inovasi kebijakan antar daerah secara lebih terbuka, inklusif, dan terdokumentasi.

Integrasi Forsesdasi ke dalam ekosistem Corpu dapat mencakup beberapa langkah strategis:

- Digitalisasi Pengetahuan: Membangun platform digital yang merekam dan menyebarkan hasil diskusi, rekomendasi, dan inovasi kebijakan dari Forsesdasi.
- Forum Pembelajaran Tematik: Menjadikan pertemuan Forsesdasi sebagai bagian dari agenda pembelajaran formal ASN Corpu, dengan pelibatan OPD sesuai topik bahasan.
- Replikasi Inovasi Daerah: Mendorong model pertukaran pengetahuan, studi tiru, dan pelatihan berbasis praktik baik antar daerah yang difasilitasi oleh Forsesdasi.
- Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah: Meningkatkan partisipasi OPD lain di luar lingkup Sekda, agar Forsesdasi tidak bersifat eksklusif melainkan menjadi forum terbuka untuk kolaborasi lintas sektor.

Dengan pendekatan tersebut, Forsesdasi tidak hanya menjadi forum diskusi non-formal para Sekda, tetapi berkembang menjadi simpul pembelajaran kebijakan daerah berbasis data, berbagi pengalaman, dan peningkatan kapasitas aparatur secara sistemik. Hal ini sejalan dengan visi ASN Corpu dalam membangun ASN yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pemerintahan yang dinamis.



REKOMENDASI

3. Kolaborasi LAN-Bappenas-Kemendagri dalam Pendampingan Teknis

Kolaborasi antarlembaga sangat diperlukan agar hasil pelatihan lanjutan Sekda dapat langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan dan perencanaan daerah. LAN tidak dapat bekerja sendiri, karena sinkronisasi antara RPJMD dan RPJMN membutuhkan dukungan substansi dari Bappenas dan keterhubungan sistem informasi dari Kemendagri. Dengan membangun model kerja sama tripartit, pelatihan tidak berhenti sebagai proses individual, tetapi menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional yang lebih kuat. LAN bertanggung jawab atas desain pelatihan dan coaching, Bappenas memfasilitasi sinkronisasi RPJMN-RPJMD, dan Kemendagri memperkuat regulasi serta integrasi sistem informasi (SIPD). Pendampingan teknis dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan

4. Bangun Sistem Evaluasi Dampak Pelatihan

Agar pelatihan pasca-retret dapat dinilai keberhasilannya secara obyektif dan berkelanjutan, Kemendagri, LAN dan Bappenas perlu menyusun sistem evaluasi dampak berbasis data. Evaluasi ini bukan hanya melihat keberhasilan administratif peserta, tetapi juga mengukur perubahan nyata dalam dokumen perencanaan, koordinasi antarsektor atau koordinasi antar OPD, adopsi program prioritas nasional di daerah dan kinerja layanan publik daerah. Evaluasi berbasis hasil akan menjadi dasar penting untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program pelatihan berikutnya.

PENUTUP

LAN RI memiliki peluang strategis untuk mentransformasikan momentum retret Sekda menjadi agenda penguatan kapasitas kepemimpinan daerah yang konkret. Dengan mendesain pelatihan pasca-retret yang aplikatif, berbasis data, dan terhubung ke dokumen perencanaan nasional, LAN tidak hanya menjalankan mandat pelatihan ASN, tetapi juga menjadi penggerak perubahan birokrasi yang berdampak. Praktik baik dari negara lain menunjukkan bahwa pelatihan tingkat tinggi yang efektif harus bersifat kontekstual, kolaboratif, dan dievaluasi berbasis hasil nyata. Sudah saatnya Indonesia membangun model baru pelatihan strategis daerah dan LAN berada di posisi kunci untuk memimpinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). "Evaluasi RPJMN dan Harmonisasi RPJMD." Paparan dalam Rakortekbang 2023.
- Bappenas. (2024). "Rakortekbang Nasional: Menuju Sinkronisasi Pusat dan Daerah." Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2024). "Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Integrasi dengan RPJMN 2025-2029." Jakarta: Ditjen Bina Bangsa.
- Kementerian PANRB. (2023). Laporan Kinerja Reformasi Birokrasi Nasional 2022-2023.
- Civil Service College Singapore. (2022). "Senior Management Programme Brochure."
- Korea Development Institute School of Public Policy and Management. (2022). "Leadership and Strategy Programme."
- Government of Canada. (2021). "Intergovernmental Personnel Exchange and Training Program."
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2023). "Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I."
- Kompas.id. (2024). "Retret Sekda Demi Sinergi Nasional?" Diakses dari <https://www.kompas.id>

